

ABSTRAK

Tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku. Sebagai sebuah negara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia disusun secara hierarki.

Saat ini hierarki yang ada masih belum mampu untuk mengakomodir semua jenis peraturan perundang-undangan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasi. Untuk itu dalam tesis ini akan difokuskan pada permasalahan : 1) Apakah tujuan perlu adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia?, 2) Bagaimanakah cara menentukan hierarki peraturan perundang-undangan?, 3) Bagaimanakah kedudukan peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati ?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder (*secondary data*) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka secara jelas kedudukan Peraturan Bupati berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun demikian oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, secara implisit/tidak langsung mengatur kedudukan Peraturan Bupati satu tingkat dibawah Peraturan Daerah, hal ini dapat diketahui dengan melihat muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Pada praktik pemerintahan, menunjukkan bahwa Peraturan Bupati disusun, ditetapkan tidak hanya untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, namun juga ditetapkan, disusun atas dasar dasar diskresi (*frei ermesen*). Sehingga Peraturan Bupati dapat menampakkan diri sebagai peraturan delegasi dan juga menampakkan diri dalam bentuk peraturan kebijakan. Hal yang demikian menimbulkan problematika kedudukan Peraturan Bupati secara sumir, hal ini dikarenakan materi muatan yang harusnya diatur dalam peraturan daerah, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Kedudukan, Peraturan Bupati, Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

The aim of the Republic of Indonesia is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote public welfare. So that in order to realize this, the State of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia adheres to the principles of the rule of law that are generally applicable. As a rule of law, the laws and regulations in Indonesia are arranged hierarchically.

At present the existing hierarchy is still not able to accommodate all types of legislation into the hierarchy of legislation, so that it then raises various problems at the implementation level. For this reason, in this thesis will be focused on the problems: 1) What is the purpose of the hierarchy of laws and regulations in Indonesia in the Indonesian Legal System? 2) What is the position of legislation outside the hierarchy of laws and regulations, 3) What is the problematic position Regulations of regents in the legislative hierarchy?

This study uses a normative juridical method. The research specifications are descriptive analytical. The data used is in the form of secondary data (secondary data) which includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, which collect data using literature. The data is then analyzed using a qualitative analysis approach.

By looking at the hierarchy of laws and regulations as stated in Law Number 12 of 2011, clearly the position of Regents Regulations is outside the hierarchy of laws and regulations as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011, but thus by Law Number 23 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation No. 80 of 2015, it explicitly / indirectly regulates the position of one-level Regents Regulations under Regional Regulations, this can be seen by looking at the content contained in the Regents Regulations namely to implement Regional Regulations or with the power of legislation. In the practice of government, it shows that the Regents of the District Regulations are drafted, determined not only to implement Regional Regulations or with the power of statutory regulations, but also stipulated, arranged on the basis of discretionary basis (*frei ermessen*). So the Regents of the Regent can manifest themselves as delegate regulations and also manifest themselves in the form of policy regulations. This also raises various problems in the regulation of regents in the hierarchy of laws and regulations. Therefore, there needs to be a change in the hierarchy of laws and regulations.

Keywords: The Position, Regulations of Regents, Hierarchy of Legislation.